



IMPLEMENTASI PROGRAM GERDU KEMPLING BIDANG EKONOMI KOTA SEMARANG TAHUN 2011

Rani Liutami¹, Dra. Rr. Hermini S, M.Si², Dr. Reni Windiani, M.Si³
Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Abstract

Poverty is a complex issue, requiring an integrated sustainable and management. Therefore, the government of Semarang city innovated to handling poverty through programs called Gerakan Terpadu Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, dan Lingkungan and also called Gerdu Kempling. Poverty is a complex issue, requiring an integrated sustainable and management. Therefore, the government of Semarang city innovated to handling poverty through programs called Gerakan Terpadu Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, dan Lingkungan and also called Gerdu Kempling who invited many stakeholder. Every stakeholder who involved has their job each other. In this research is discussing about implementation Gerdu Kempling program in sector economy on 2011 which is focusing in Tanjung Mas village chief, Mangkang Kulon village chief and Teroboyo Kulon village chief. The result show that realization Gerdu Kempling program in sector economy is different in each region and already going to good governance concept. Apart from that also found the hardest part or hindrance factor in process implementation program.

Key Words : Gerdu Kempling, implementation, stakeholder

Abstraksi

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, sehingga diperlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang berinovasi menanggulangi masalah kemiskinan melalui program Gerakan Terpadu Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan atau yang disebut dengan Gerdu Kempling yang melibatkan berbagai *stakeholder*. Setiap *stakeholder* yang terlibat memiliki perannya masing-masing. Dalam penelitian ini dibahas mengenai implementasi program Gerdu Kempling di bidang ekonomi pada tahun 2011 dengan lokus Kelurahan Tanjung Mas, Kelurahan Mangkang Kulon dan Kelurahan Terboyo Kulon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Gerdu Kempling bidang ekonomi berbeda-beda di setiap wilayahnya dan sudah mulai merujuk pada konsep *good governance*. Selain itu pula ditemukan kendala atau faktor penghambat dalam proses implementasi program.

Kata Kunci : Gerdu Kempling, implementasi, *stakeholder*

¹ Rani Liutami adalah mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang alamat email : raniliutami@rocketmail.com

² Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

³ Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di seluruh belahan bumi. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang melainkan juga dialami oleh negara maju. Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Kemiskinan cenderung terjadi di daerah pedesaan yang terpencil dan di daerah perkotaan yang padat penduduk. Pada umumnya, selain kurang pendidikan dan tiadanya akses untuk menyuarkan keluhan dan aspirasinya, mereka bersikap menutup diri atas kemiskinannya atau ketidakberdayaannya terhadap orang luar. Selama ini pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan melalui berbagai program yang dirancang sedemikian rupa. Namun, masalah kemiskinan masih saja belum bisa teratasi dengan baik. Secara nasional program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan, diantaranya melalui berbagai Inpres, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Bangdes, dan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Ada pula yang melalui pemberdayaan seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan seterusnya.

Sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, sebagai kota yang mengalami perkembangan, Kota Semarang tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan. Namun dalam perkembangannya, tingkat kemiskinan di Kota Semarang masih cenderung meningkat. Tercatat sampai saat ini angka kemiskinan di Kota Semarang mencapai 26,41% dari jumlah penduduk, yaitu sebanyak 111.558 keluarga atau 398 ribu jiwa dari total penduduk sekitar 1.553.778 jiwa (Keputusan Walikota Semarang Nomor 410/370 Tahun 2010 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2010), yang tersebar di 177 kelurahan. Oleh karena kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang kompleks, maka penanganannya diperlukan partisipasi serta sinergitas dari berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu melalui program Gerdu Kempling (Gerakan Terpadu Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan) yang diluncurkan pada tanggal 24 Maret 2011. Pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan Gerdu Kempling dibagi dalam 5 (lima) tahapan dari tahun 2011 – 2015, dan di tahun 2015 diharapkan 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang dapat tersentuh oleh Program Gerdu Kempling. Gerdu Kempling merupakan program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi dan permasalahan warga miskin pada setiap karakteristik kawasan (tepat program, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna).

1. Dengan adanya Program Gerdu Kempling di Kota Semarang, peneliti ingin melihat dan meneliti implementasi kebijakan program Gerdu Kempling di Kota Semarang pada tahun 2011 yang mana lebih memfokuskan penelitian pada bidang ekonomi dengan lokus penelitian di beberapa kelurahan yang dijadwalkan tercover dalam Gerdu Kempling 2011 diantaranya Tanjung Mas (Semarang Utara), Terboyo Kulon (Kecamatan Genuk), dan Mangkang Kulon (Kecamatan Tugu). Melihat hal tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah implementasi program Gerdu Kempling di bidang ekonomi Kota Semarang Tahun 2011? (2) Apa saja faktor pendorong dalam implementasi program Gerdu Kempling bidang ekonomi Kota Semarang Tahun 2011? (3) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi program Gerdu Kempling bidang ekonomi Kota Semarang Tahun 2011?

B. Kajian Teori

Definisi kemiskinan menurut Bank Dunia yang dikutip dari Gunawan Sumodiningrat (1999:2) oleh Ambar Teguh Sulistiyani (Sulistiyani, 2004:17) adalah *“Poverty is concern with absolute standart of living standart of part of society the poor in equality refers to relative living standart across the whole society”*. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa kemiskinan terkait dengan batas absolut standar hidup sebagian masyarakat miskin. Masyarakat miskin sendiri menurut BAPPENAS adalah orang-orang

yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab timbulnya kemiskinan di masyarakat, dari kurangnya pendidikan, tingginya pengangguran, rendahnya pendapatan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya yang mengakibatkan seseorang menjadi tidak produktif.

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang telah dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Proses kebijakan publik menurut James Anderson meliputi 5 tahapan, yaitu formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi, dan evaluasi.

Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Riant Nugroho (2008:432) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi sebagai suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan kebijaksanaan kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut membawa hasil sebagaimana diharapkan. Sehingga implementasi merupakan tahap yang sangat penting dalam suatu kebijakan karena dalam implementasi, suatu tindakan dari suatu kejadian ditransmisikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna merealisasikan tujuan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel tersebut tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa variabel atau faktor yang kompleks yang saling berinteraksi. Model implementasi menurut Van Meter dan Horn dalam Subarsono (2005: 99-101), memiliki enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan/komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi implementor.

Dewasa ini *good governance* dipandang sebagai pendekatan yang paling relevan dalam tataran pemerintahan. *Good governance* dapat dicapai dengan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis sehingga diperlukan kolaborasi atau kemitraan elemen-elemen *governance*, yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Selanjutnya disusun 9 karakteristik *good governance* (Dwidjowijoto, 2003:219-220), yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability*, serta *strategic vision*.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh objek penelitian, dan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Implementasi program ini sudah berlangsung, oleh karena itu penelitian ini menggunakan data-data dokumentasi yang ada dan dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber yang pernah ikut dalam proses implementasi program.

D. Gambaran Umum Kota Semarang dan Gerdu Kempling

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dan kota strategis yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis 60 50' - 70 10' Lintang Selatan dan garis 1090 50' - 1100 35' Bujur Timur dengan ketinggian antara 0,75 sampai 348,00 meter diatas permukaan laut dengan jumlah penduduk sampai dengan akhir Desember 2011 sebanyak 1.544.358 jiwa yang terdiri dari 767.884 jiwa penduduk laki-laki dan 776.474 jiwa penduduk perempuan. Dari hasil final uji publik data kemiskinan 2011 tercatat warga miskin (gakin) di Kota Semarang berjumlah 448.398 jiwa (128.467 KK). Berdasar data tersebut, Kecamatan Semarang Utara menempati posisi teratas dengan gakin sejumlah 55.458 jiwa (15.628 KK) dan posisi terendah Kecamatan Gajahmungkur dengan gakin 15.612 jiwa (4.630 KK). Banyaknya jumlah keluarga miskin yang ada di Kota Semarang pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Database Keluarga Miskin Kota Semarang Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jumlah (KK)	Jumlah (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Semarang Tengah	5.877	19.392
2.	Semarang Utara	15.628	55.458
3.	Semarang Timur	7.710	26.534
4.	Gayamsari	7.004	25.563
5.	Genuk	7.892	29.859
6.	Pedurungan	6.073	22.743
7.	Semarang Selatan	6.368	20.710
8.	Candisari	7.770	26.675
9.	Gajahmungkur	4.630	15.612
10.	Tembalang	13.098	46.347
11.	Banyumanik	5.888	20.473
12.	Gunungpati	7.138	23.603
13.	Semarang Barat	15.147	52.805
14.	Mijen	5.927	18.694
15.	Ngaliyan	8.027	28.044
16.	Tugu	4.443	15.859
	Jumlah	128.647	448.398

Sumber: www.pemsosbudsimgakin.semarangkota.go.id diakses pada tanggal 4 Mei 2012

Kelurahan Tanjung Mas, Mangkang Kulon dan Terboyo Kulon merupakan kelurahan-kelurahan yang dijadwalkan tercover program Gerdu Kempling tahun 2011. Kelurahan Tanjung Mas memiliki luas wilayah 323.782 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 30.526 jiwa. Dari total jumlah penduduk yang ada, 17.116 jiwa atau 56,07% merupakan warga miskin. Mata pencaharian warga Kelurahan Tanjung Mas didominasi oleh buruh dan juga nelayan. Kelurahan Mangkang Kulon memiliki luas wilayah 399,819 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 3.581 jiwa (1.553 KK) dan 370 KK merupakan warga miskin. Sedangkan Kelurahan Terboyo Kulon memiliki luas wilayah 197.501 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 594 jiwa (168 KK) dan memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.

Gerdu Kempling merupakan kepanjangan dari Gerakan Terpadu bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan. Program ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut: (1) Sebagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dengan mensinergikan program Pemerintah Kota Semarang dengan stakeholder yang ada yaitu PTN dan PTS, LSM, perbankan, BUMN, tokoh masyarakat, dan para konglomerat/pengusaha; (2) Untuk mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan Pemerintah Kota Semarang dengan seluruh *stakeholder* khususnya dalam program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang; (3) Guna mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di Kota Semarang dalam percepatan penanggulangan kemiskinan sehingga tujuan dan sasaran program penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

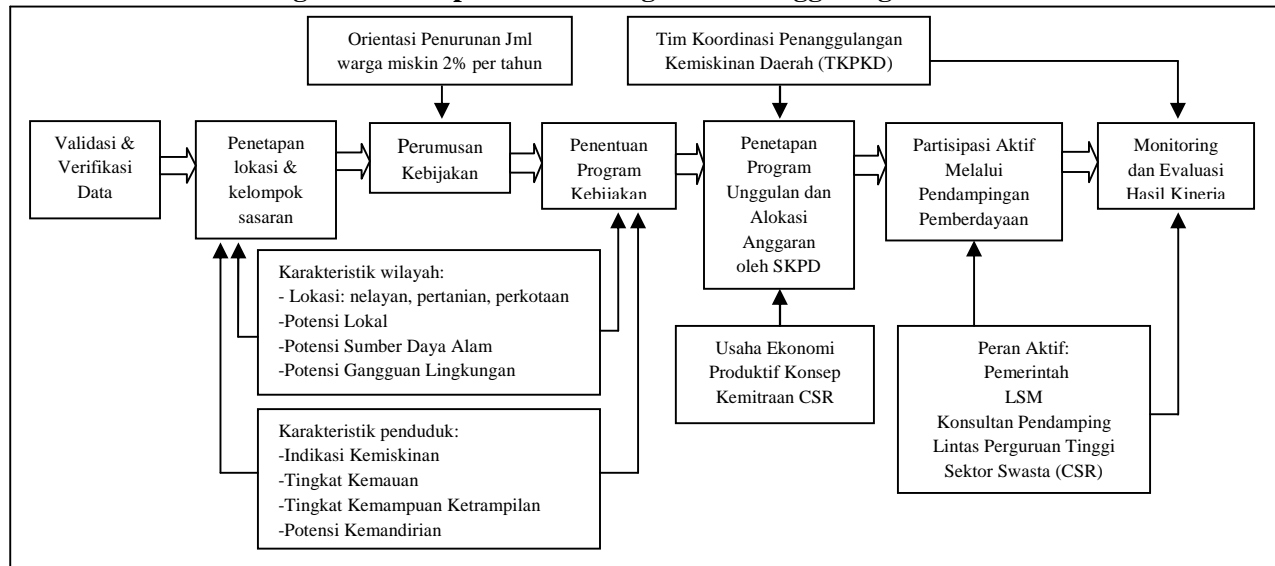
E. Hasil Penelitian

Gerdu Kempling merupakan program yang dimaksudkan sebagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang yang mana mensinergikan antara program pemerintah kota dengan *stakeholders* yang ada, seperti PTN/PTS, LSM, Perbankan, BUMN, tokoh masyarakat dan pengusaha guna mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di Kota Semarang sehingga tujuan dan sasaran program penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Para agen pelaksana program Gerdu Kempling Kota Semarang diharuskan mengetahui kejelasan isi dan tujuan dari program ini agar dapat direalisasikan dengan sebaik mungkin sehingga kemungkinan

adanya multipretasi isi kebijakan program yang dapat menimbulkan masalah dapat dihindari. Berikut ini merupakan tahapan implementasi program Gerdu Kempling.

Bagan 1
Kerangka Pikir Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan



Sumber : Pemerintah Kota Semarang Tahun 2011

Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber, menunjukkan bahwa para pelaku implementasi program Gerdu Kempling bidang ekonomi tahun 2011 sudah memahami isi dan tujuan serta sasaran program ini. Dalam pelaksanaan tahap I tahun 2011 pemerintah telah memprioritaskan 32 kelurahan dari 16 kecamatan sebagai *pilot project*. Program ini berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan sebesar 2% setiap tahunnya. Pelaksanaan Gerdu Kempling ini di setiap kelurahan sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Pemkot Semarang, yaitu melalui 7 tahapan mulai dari validasi dan verifikasi data warga miskin sampai dengan monitoring dan bahkan evaluasi kegiatan.

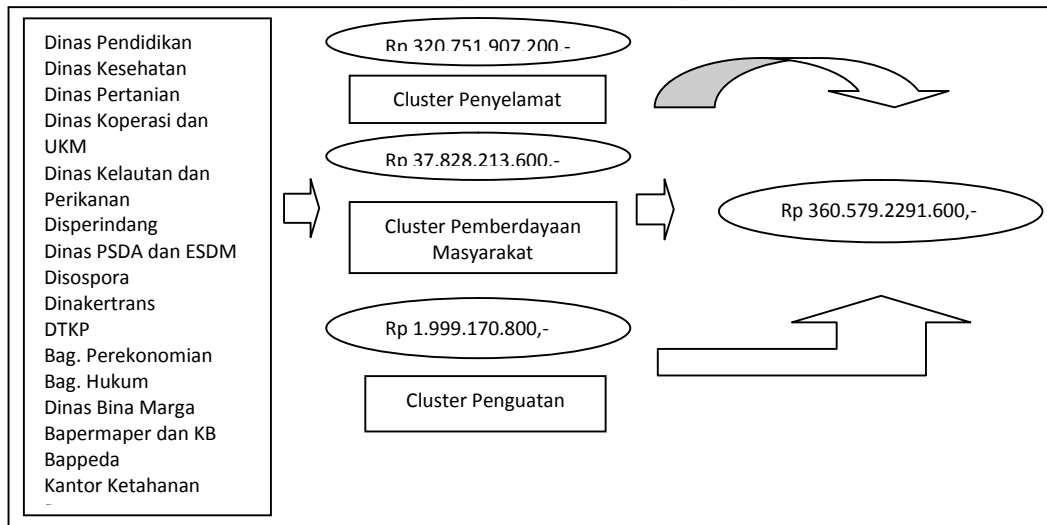
Dalam implementasi sebuah program tentu akan melibatkan banyak pihak yang berperan sebagai aktor yang melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan program tersebut. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, termasuk dalam proses implementasi program Gerdu Kempling bidang ekonomi ini. Keterlibatan berbagai *stakeholder* dalam pelaksanaan program ini dikarenakan adanya kesadaran bahwa masalah kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya. Adanya kesadaran dari *stakeholder* tersebut tentu akan memudahkan terciptanya komitmen untuk terus mendukung berlangsungnya program pemerintah ini. Pengusaha, pihak perbankan dan seluruh pihak yang terlibat lainnya merupakan sumberdaya yang penting dalam keberlangsungan program. Hubungan sinergis antara masyarakat, pemerintah, dan swasta menjadi penting dalam mewujudkan *good governance*. Setiap *stakeholder* yang terlibat dalam program Gerdu Kempling ini memiliki perannya masing-masing yang saling melengkapi satu sama lain. Dana berasal dari pengusaha, BUMN, dinas pemerintah dan perbankan kemudian dilimpahkan kepada PTN/S sebagai media organisator dan perencanaan yang mana meliputi analisis kebutuhan dan rencana program sebelum diserahkan pada kecamatan, kelurahan dan warga miskin sebagai target.

Dalam rangka percepatan program penanggulangan kemiskinan Kota Semarang melalui Gerdu Kempling Tahun 2011 ini, Walikota Semarang pun telah menginstruksikan mengenai pihak-pihak pelaksana Gerdu Kempling yang tercantum dalam Instruksi Walikota Semarang Nomor: 054/2/2011 yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2011. Di dalam instruksi tersebut, dijelaskan bahwa pelaksanaan Gerdu Kempling memiliki tim pengendali tingkat kecamatan bagi camat dan tim pelaksana tingkat kelurahan

bagi lurah lokasi program percepatan penanggulangan kemiskinan Kota Semarang Tahun 2011. Kemampuan pelaksana dapat menentukan keberhasilan implementasi program Gerdu Kempling.

Di luar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Pengalokasian dana yang tepat pada masing-masing kegiatan akan sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi program. Berikut ini merupakan gambaran alur alokasi dana program Gerdu Kempling Tahun 2011.

Bagan 2
Alur Alokasi Dana Program Gerdu Kempling Tahun 2011



Sumber: Pemerintah Kota Semarang Tahun 2011

Dana yang telah dianggarkan tersebut kemudian dialokasikan ke dalam kegiatan dalam pelaksanaan program. Secara terperinci pada pelaksanaan Gerdu Kempling 2011, disalurkan dana sejumlah Rp 8.691.194.500,- guna menangani 5.688 KK atau sebesar 4 % dari total warga miskin sebanyak 128.647 KK atau 448.398 jiwa. Dana tersebut, berasal dari bantuan CSR perusahaan, perbankan, BUMN, PTN/ PTS sebesar Rp 4.275.351.000,- bagi 2.762 KK dan sebesar Rp 4.415.843.500,- dari SKPD Pemkot Semarang bagi 2.926 KK.

Selanjutnya mengenai masalah pencairan bantuan. Dari data yang dihimpun melalui wawancara dengan pihak Bappeda, didapat keterangan bahwa proses pencairan dan pengalokasian bantuan yang berasal dari CSR bagi warga miskin sasaran program diberikan secara langsung oleh pihak pemberi bantuan melalui PTN/PTS. Dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang hanya bertindak sebagai fasilitator. Bantuan yang sudah diterima oleh pihak sasaran program tersebut dimonitor dan dipandu oleh PTN/PTS. Kemudian akan dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan 3 (tiga) bulan sekali oleh Bappeda Kota Semarang. Tidak ikut campurnya Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan dana bantuan dari CSR maupun SKPD terkait menunjukkan bahwa pemkot benar-benar menyerahkan kekuasaannya kepada stakeholder termasuk masyarakat miskin itu sendiri untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, dalam proses implementasi Gerdu Kempling ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana oleh perguruan tinggi pengampu tanpa melalui Pemerintah Kota Semarang ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Hal tersebut dilakukan karena jikalau dana bantuan CSR harus melalui birokrasi pemerintah terlebih dahulu tak jarang akan terjadi penyelewengan dana seperti yang sering terjadi dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah lainnya.

Adapun bentuk-bentuk bantuan yang diterima oleh kelurahan-kelurahan obyek penelitian terkait dengan bidang ekonomi, dipaparkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Sumber Daya Dalam Implementasi Gerdu Kempling
Bidang Ekonomi Tahun 2011

No.	Kelurahan	Stakeholder Terlibat	Bentuk Bantuan
1.	Kelurahan Tanjung Mas	SKPD Pemkot UNNES PT. Pertamina	Pemberian pelatihan wirausaha Pemberian bantuan modal/pinjaman ringan Penyerapan tenaga kerja Pemberian peralatan usaha
2.	Kelurahan Mangkang Kulon	SKPD Pemkot UNDIP Bank Mandiri	Pemberian pelatihan wirausaha Pemberian bantuan bibit ternak, seperti lele dan kambing Pemberian bantuan peralatan usaha
3.	Kelurahan Terboyo Kulon	SKPD Pemkot	Pemberian pelatihan wirausaha, seperti menjahit Pemberian bantuan peralatan usaha

Sumber: Data diolah, hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terkait variabel sumber daya maka dapat disimpulkan bahwa Dari segi sumber daya manusia dan bantuan, tidak semua kelurahan yang menjadi sasaran program mendapatkan bantuan dari sumber-sumber yang diharapkan sehingga dalam pelaksanaan telah terjadi ketidaksesuaian dengan konsep tujuan program tersebut.

Variabel ketiga, yakni komunikasi. Menurut George C. Edward III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Banyaknya *stakeholder* yang terlibat sebagai agen pelaksana program mengakibatkan diperlukannya suatu wadah yang jelas untuk berkoordinasi satu sama lain. Oleh karena itu, komunikasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Semarang secara intensif. Dari hasil wawancara dengan narasumber, didapat keterangan bahwa sejauh ini komunikasi yang terjalin di antara para agen pelaksana program sudah cukup baik. Pengkomunikasian kepada warga miskin sasaran program pun sudah dilaksanakan dengan cukup baik melalui sosialisasi. Dalam sosialisasi maupun rapat koordinasi, warga diikutsertakan agar mereka dapat menyampaikan aspirasinya sehingga dapat terwujud *good governance*.

Dalam konteks karakteristik agen pelaksana, pusat perhatian meliputi organisasi formal dan informal, sehingga merujuk pada adanya struktur birokrasi maupun organisasi yang jelas. Namun, dalam penelitian ditemukan bahwa pada kenyataannya tidak semua kelurahan sasaran program memiliki struktur organisasi/tim pelaksana yang jelas, salah satunya di Kelurahan Terboyo Kulon. Padahal untuk melaksanakan suatu program secara maksimal dan sesuai dengan tujuan yang terkandung, maka perlu adanya pembentukan suatu susunan tim yang bertindak sebagai pelaksana yang juga sekaligus bertanggungjawab dalam pelaksanaan program. Pengorganisasian ini bukan hanya sekedar menyangkut pembentukan tim tetapi juga metode yang digunakan dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat terwujud program yang terstruktur dan terarah sehingga bantuan yang diberikanpun dapat mengalir tepat pada sasaran.

Kondisi sosial, politik dan ekonomi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi program Gerdu Kempling. Kondisi lingkungan yang kondusif dapat dilihat dari partisipasi masyarakatnya dan juga dukungan dari pihak kelurahan serta seluruh perangkat pemerintahan yang ada di dalamnya. Adanya dukungan penuh dari Lurah Tanjung Mas menggambarkan bahwa kondisi politik di kelurahan ini cukup baik. Masyarakat hidup dengan kondisi perekonomian yang cukup lemah namun bersama-sama ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini pun memberikan dampak positif dalam pelaksanaan program. Selain itu, warga kelurahan ini merupakan warga yang rukun dan kompak sehingga pelaksanaan program Gerdu Kempling khususnya di bidang ekonomi di kelurahan ini pun dapat berjalan dengan cukup baik. Masyarakat Kelurahan Mangkang Kulon yang didominasi oleh petani dan nelayan membuat

kondisi perekonomian mereka termasuk ke dalam golongan menengah ke bawah. Namun demikian mereka memiliki respon dan tingkat partisipasi yang cukup baik dalam pelaksanaan program Gerdu Kempling khususnya di bidang ekonomi. Selain itu pihak kelurahan pun turut memberi dukungan dengan adanya susunan anggota pelaksana program yang jelas sehingga program dapat berjalan dengan cukup baik. Lain halnya dengan yang terjadi di Kelurahan Terboyo Kulon. Kondisi ekonomi warga Kelurahan Terboyo Kulon yang masuk dalam golongan menengah ke bawah serta kondisi sosial mereka yang berpendidikan relatif rendah dan juga permasalahan rob dan banjir mengakibatkan masalah kemiskinan semakin buruk. Belum lagi dukungan dari pihak kelurahan yang kurang maksimal dengan tidak adanya susunan anggota pelaksana kegiatan yang jelas sehingga pelaksanaan Gerdu Kempling di kelurahan ini tidak maksimal.

Variabel terakhir yaitu disposisi agen pelaksana. Dalam disposisi agen pelaksana, sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Para agen pelaksana program memiliki komitmen yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan program Gerdu Kempling. Komitmen yang cukup tinggi tampak terjadi di Kelurahan Tanjung Mas dan juga Kelurahan Mangkang Kulon karena dalam pelaksanaannya di kedua kelurahan ini didukung oleh perguruan tinggi dan juga sektor swasta, seperti perbankan dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah tersebut. Namun sayang, komitmen yang cukup tinggi dari *stakeholder* non-pemerintah tidak dirasakan oleh warga miskin di Kelurahan Terboyo Kulon. Oleh karena itu, pelaksanaan Gerdu Kempling di Kelurahan Terboyo Kulon tidak berjalan dengan baik dan tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup masyarakatnya.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Implementasi Program Gerdu Kempling Bidang Ekonomi Kota Semarang Tahun 2011” dengan lokus Kelurahan Tanjung Mas, Kelurahan Mangkang Kulon dan Kelurahan Terboyo Kulon, maka didapat kesimpulan bahwa pelaksanaan Gerdu Kempling khususnya di bidang ekonomi pada tahun 2011 berbeda-beda di setiap wilayahnya. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Semarang tidak berjalan sendiri, tetapi bersinergi dengan berbagai *stakeholders*. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good governance*, yang mana hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiga domain dalam *governance* tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sektor pemerintahan lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktifitas di bidang ekonomi. Sedangkan masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintahan maupun swasta karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Dari keseluruhan proses implementasi dapat ditarik kesimpulan mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh dan kontribusi terhadap keberhasilan program Gerdu Kempling bidang ekonomi tahun 2011. Faktor-faktor yang berkontribusi antara lain: (1) Adanya koordinasi dan sinergitas antara aparat birokrasi Pemerintah Kota Semarang dengan berbagai *stakeholder*, seperti perguruan tinggi, perbankan, perusahaan dan lain sebagainya. (2) Adanya bantuan yang tidak hanya bersifat material, seperti bimbingan dan pelatihan suatu ketrampilan. Dengan demikian warga miskin sasaran program yang tadinya tidak memiliki keahlian sama sekali untuk berusaha, kini mampu berkarya. (3) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas terutama kepada masyarakat kelas bawah mengenai adanya program Gerdu Kempling. Sehingga mempengaruhi responsivitas masyarakat terhadap program/kegiatan yang dijalankan. (4) Terbatasnya bantuan dana dan sarana, baik anggaran dari Pemkot Semarang maupun dari para *stakeholders*. (5) Minimnya pendampingan dalam program Gerdu Kempling dan program pendampingan juga tidak berkelanjutan. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya komitmen dari pihak perguruan tinggi dalam menanggulangi kemiskinan melalui program Gerdu Kempling ini. (6) Kurang adanya sinkronisasi antara bantuan yang diberikan dengan apa yang dibutuhkan oleh warga miskin sasaran program sehingga bantuan terkesan salah sasaran dan kurang efektif.

Berdasarkan keenam variable Van Meter dan Horn yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan implementasi program Gerdu Kempling ini didapatkan satu variable yang paling menonjol yaitu sumber daya. Sumber daya memegang peranan yang sangat penting dalam implementasi program Gerdu Kempling ini karena ketersediaan sumber daya merupakan penggerak pelaksanaan program.

G. Saran

(1) Adanya ketimpangan dalam pelaksanaan program di kelurahan yang satu dengan yang lainnya menunjukkan adanya perbedaan kemampuan kelurahan dalam mengelola dan mengkoordinasi pihaknya dengan stakeholder pemberi bantuan. Oleh karena itu, sebagai pihak yang berperan sebagai penyelenggara program hendaknya Pemerintah Kota Semarang lebih aktif lagi dalam memfasilitasi dan menjembatani hubungan kerjasama antara pihak kelurahan dengan *stakeholders* pemberi bantuan, seperti perbankan ataupun perusahaan.

(2) Sebaiknya sosialisasi program dilakukan dengan lebih intensif terutama kepada warga sasaran program untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap isi dan tujuan program yang dijalankan tersebut. Selain itu, sosialisasi kepada aparat pemerintah dan *stakeholders* pelaksana program melalui rapat koordinasi pun juga sebaiknya lebih ditingkatkan .

(3) Perlu ditingkatkannya sinergitas Pemerintah Kota Semarang dengan *stakeholders* pemberi bantuan/CSR dan lebih dikembangkannya jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang.

(4) Lebih ditingkatkannya komitmen bagi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam melakukan pendampingan di setiap wilayah sasaran program agar kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri.

(5) Pendataan terhadap warga miskin di setiap kelurahan hendaknya lebih cermat sehingga bantuan tidak salah sasaran. Selain itu, bentuk bantuan yang diberikan juga harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang dimiliki oleh warga sasaran program agar tercipta sinkronisasi antara kebutuhan dengan bantuan/kegiatan sehingga tujuan dari program dapat tercapai dengan baik.

H. Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2008. *Memahami Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Bappeda. 2011. *Dokumentasi Gerdu Kempling*. Semarang: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Bappeda dan BPS Kota Semarang. 2011. *Kota Semarang Dalam Angka 2010*. Semarang: Bappeda dan BPS Kota Semarang.

BPS Kota Semarang. 2007-2010. *Series Data Umum Kota Semarang*. Semarang: BPS Kota Semarang.

Buku Kemiskinan Mangkang Kulon Tahun 2011. Semarang: Mangkang Kulon.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Laporan Gerdu Kempling Kelurahan Mangkang Kulon Tahun 2011. Semarang: Mangkang Kulon

Laporan Gerdu Kempling Kelurahan Tanjung Mas Tahun 2011. Semarang: Tanjung Mas.

Laporan Gerdu Kempling Kelurahan Terboyo Kulon Tahun 2011. Semarang: Terboyo Kulon.

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kota Semarang. 2012. *Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Setahun Gerdu Kempling)*. Semarang: Pemkot Semarang.
- Rekapitulasi Data Warga Miskin Kota Semarang. Diakses melalui <http://www.pemsosbudsimgakin.semarangkota.go.id/> pada tanggal 4 Mei 2012 pukul 05.15 WIB.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumarto, Hetifah SJ. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syahrani dan Syahrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.